KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU Pemilu Diharapkan Perkuat Desentralisasi
Tanggal : Jumat, 08 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

Revisi UU Pemilu Diharapkan Perkuat Desentralisasi

JAKARTA, KOMPAS – Desain pemilihan umum selama ini dianggap masih terpusat atau sentralistik, baik dalam proses penentuan kandidat calon kepala daerah yang tidak lepas dari pengaruh elite politik di tingkat pusat maupun dalam penyelenggaraannya. Untuk itu, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum diharapkan bisa memperkuat desentralisasi.

Hal itu mengemuka dalam diskusi daring bertajuk "Melawan Arus Sentralisasi: Menyigat UU No 17/2017 dari Beranda Otonomi Daerah" yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Kamis (7/5/2026).

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Analis Kebijakan KPPOD Eduardo Edwin Ramla, anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, serta Ketua DPRD Sabu Raijua Dance Ishak Palit yang juga Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia. Hadir pula Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti yang juga mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Ghaliya Putri.

Eduardo menilai, semangat reformasi berjalan lebih dari 25 tahun, desentralisasi melalui demokrasi di tingkat lokal masih bermasalah. Hal ini tampak dari masih dominannya elite politik di pusat dalam penentuan kandidat yang berkontestasi politik di daerah.

Ia mengutip temuan Lembaga Kompas terkait Pemilihan Legislatif 2024, yakni 57,5 persen dari total 9.917 calon tingkat dua luar daerah pemilihan (dapil). Bahkan, sebanyak 36,4 persen di antaranya tidak lahir di daerah pemilihan kompetisi calon itu berkontestasi.

"Tidak sepenuh kandidat yang muncul dari representasi dan warga daerah dengan baik. Kalaupun kebijakan-kebijakan di daerah itu bersifat menggiur kepada urusan-urusan elektoral dan suara rakyat tidak dapat terwakili dengan optimal," ujar Edwin.

Sementara Almas berpandangan, ada kesenjangan antara proses kontestasi politik yang transaksional dan mahalnya biaya desentralisasi. Aturan terkait pendanaan kampanye yang batasnya tinggi memicu kontestasi yang berujung pada proses transaksional.

Celah praktik-praktik ekonomi ini dikhawatirkan oleh kandidat dominan dewan pimpinan pusat atau DPP partai politik dalam penyelenggaraan kepala daerah ataupun pengambilan keputusan politik. Hal ini pada akhirnya juga memengaruhi akuntabilitas dan transparansi.

Menurut Ramlan, meskipun pemilu merupakan tanggung jawab pusat, sebagian urusan sudah seharusnya diserahkan ke daerah, salah satunya distribusi logistik.

Ramlan yang berpengalaman sebagai Ketua KPU pada periode 2004-2007 mencontohkan permasalahan anggaran pengadaan distribusi Pemilu 2024. KPU menyewa jet pribadi dengan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

"Ini menurut saya KPU salah. Kenapa? Karena logistik yang didistribusikan ke kabupaten dan kota itu tanggung jawab KPU kabupaten kota. Pemda-lah yang mengurusi pasti, dalam hal ini KPU. Akan tetapi, dalam praktiknya, hanya ada desentralisasi, kalau konsepnya subsidiaritas," ujarnya.

Momentum perbaikan

Sebagian besar dari narasumber berpendapat, revisi UU Pemilu menjadi momentum untuk memperbaiki beragam persoalan itu. Edwin berpandangan, revisi UU Pemilu diharapkan dapat mengedepankan desentralisasi sebagai bagian dari cita-cita Reformasi 1998. Revisi perlu segera dibahas dengan partisipasi publik yang bermakna.

"Momentum revisi UU Pemilu ini adalah titik mula pertobatan reformatif kita, sehingga perlu dibahas Demokrasi lokal ini harusnya diperkuat. Sistem pemilu harus memungkinkan mereka yang berkompeten dan taat prosedur untuk lebih mudah maju dalam kontestasi," ungkapnya.

Almas juga melihat pembahasan RUU Pemilu perlu dilakukan sesegera mungkin karena mempengaruhi tata kelola penyelenggaraan kontestasi politik. Selain itu, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu lebih profesional, independen, dan mempunyai kapasitas mumpuni.

Ia berharap revisi UU Pemilu mengatur lebih detail adanya pembatasan dana, transparansi, hingga akuntabilitas. Dengan demikian, pemilu menghasilkan penyelenggara negara baik di ranah eksekutif maupun legislatif, yang mampu merepresentasikan kepentingan dan suara publik.

Khozin menyatakan bahwa Komisi II DPR masih menampung berbagai masukan terkait RUU Pemilu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut RUU Pemilu menjadi payung besar yang akan beriringan dengan berbagai regulasi sehingga harus dibahas dengan hati-hati. (BTG)

Sentralisasi penyelenggara

Problem sentralisasi juga ada dalam penyelenggaraan pemilu.